



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAERUDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 214739

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.910.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/55 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **527.080.000**

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOBIL, HONDA HONDA CITY HB1.5L RS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 283.385.000



5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.665.000

6. MOTOR, HONDA VARIO HONDA VARIO 125 CBS ISS PLUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.430.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.040.892.170

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.523.422.170

III. HUTANG Rp. 22.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.500.922.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.